

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai entitas negara, mengimplemtasikan sistem politik demokrasi. Proses pemilihan umum (pemilu) yang berfungsi sebagai mekanisme saat menetapkan pimpinan baik ditinggi pusat maupun daerah menjadi indikator empiris yang menunjukkan status demokarsi sebuah negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya menjalankan demokrasi melalui proses pemilu tersebut. Pada konteks pemilu, partisipasi masyarakat menjadi aspek esensi sebagai manifestasi sehatnya proses demokrasi. Namun, problematika seringkali muncul dimana proses pemilihan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya, ada mobilisasi pemilih dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, seperti memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilih oleh masyarakat, terutama di kalangan yang memiliki tingkat pendidikan politik yang rendah.

Berdasarkan pada UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peningkatan mutu pelaksanaan pemilu guna mendukung realisasi hak masyarakat dalam berpolitik memerlukan penyelenggara pemilu profesional yang berintegritas, kapabel dan akuntabel melalui lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini bertujuan untuk mencapai partisipasi masyarakat yang maksimal dalam mendukung proses pemilu yang transparan, adil, dan jujur selaras dnegan prinsip-prinsip kearifan lokal dan demokrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, UU tersebut menegaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, KPU perlu menyusun sebuah program bersifat edukatif bagi pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dengan memperhatikan konteks kearifan lokal daerah setempat.

KPU harus menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya dengan mengadopsi langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Langkah strategis tersebut dapat berupa Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang bertujuan untuk menggalakkan partisipasi politik masyarakat pada proses pemilu. Penyelenggaraan program-program ini disusun secara hierarkis, di mana KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat memiliki peran yang ditetapkan sejalan dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Komisi Pemilihan Umum. Sehingga, di tingkat kabupaten/kota, tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, contohnya seperti yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Malang.

Partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu menjadi persoalan yang cukup pelik. Di Indonesia sendiri pasca reformasi mengalami kondisi pasang surut, misalnya dalam pemilu nasional pada tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih 84,1% menurun pada tahun 2009 menjadi 71% lalu pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 75,11% (Data KPU RI). Kondisi serupa juga dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia misalnya di Kota Surabaya Pilkada tahun 2015, partisipasi masyarakat 52,17 %, sedangkan tahun 2020 mencapai 52,4 %. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Malang. Dalam Pilkada tahun 2010 tingkat partisipasi masyarakat 59,5% pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 58,5% masih dibawah target nasional yaitu 77,5% (Data KPU Kab. Malang).

Berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu sudah banyak dilakukan. Contohnya, melalui komunikasi dan pemetaan segmen pemilih (Satma & Putri, 2019), pembagian segmen pemilih strategis seperti pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok agama, kelompok pinggirn, dan penyandang disabilitas, maupun melalui strategi jangka panjang yang mencakup perumusan tujuan dan sasaran, pemilihan tindakan, serta alokasi sumber daya yang tepat (Gleko, Suprojo, & Lestari, 2017). Namun demikian upaya-upaya di atas mengalami kendala, terutama ketidakseimbangan alokasi dana dari pemerintah dalam kaitannya dengan jumlah penduduk yang ada (Satma & Putri, 2019) dan kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi (Gleko et al., 2017).

Persoalan partisipasi pemilih juga dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Malang, tingkat partisipasi pemilih mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai contoh, pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai puncaknya pada angka 92,6 persen. Namun,

angka tersebut mengalami penurunan pada Pemilu 2004, baik untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) yang mencapai 84,1 persen, maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran pertama dan kedua yang masing-masing mencapai 78,2 persen dan 76,6 persen. Kemudian, terjadi peningkatan pada Pemilu 2009, meskipun tidak sebesar pada Pemilu 1999, dengan tingkat partisipasi pemilih untuk Pileg sebesar 70,9 persen dan Pilpres sebesar 71,7 persen. Namun, tren ini kembali menurun pada Pemilu 2014, dengan tingkat partisipasi pemilih untuk Pileg sebesar 72 persen dan Pilpres sebesar 69,58 persen.

Fenomena serupa juga terlihat dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, di mana tingkat partisipasi mencapai 69,06 persen pada Pemilihan 2015, meningkat menjadi 74,2 persen pada Pemilihan 2017, namun mengalami penurunan menjadi 73,24 persen pada Pemilihan 2018. Pada pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, rendahnya partisipasi pemilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2015 menjadi kekhawatiran KPU Kabupaten Malang mengingat data partisipasi pemilih dalam pilkada Kabupaten Malang selalu berada dibawah target nasional.

Kajian tentang upaya peningkatan partisipasi pemilih masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan, misalnya kajian yang melihat institusi negara dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih melalui pelaksanaan sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, dalam bentuk pesta rakyat, dan pendidikan pemilih pemula (Triralmaldi, Miko, & Asrinaldi, 2019) maupun organisasi *non government* contohnya melalui Relawan Demokrasi (Relasi) yang melakukan sosialisasi dalam basis mereka masing-masing (Farisi & Maulana, 2020). Namun demikian kajian-kajian tersebut menggambarkan persoalan pemilih secara umum tanpa memperhatikan program yang didasarkan pada kondisi persoalan *rill* pemilih. Kajian ini hendak melihat bagaimana strategi intitusi negara dalam hal ini KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah pemilih dengan tingkat partisipasi rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Malang terdapat enam kecamatan yang teridentifikasi sebagai daerah dengan partisipasi pemilih rendah. Dalam tiga kali pelaksanaan pilkada dari tahun 2010-2020 daerah ini merupakan daerah dengan partisipasi rendah.

Kabupaten Malang memiliki wilayah seluas $\pm 3.238,26$ km², dimana sebanyak 1.195.327 masyarakatnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih. Pemilih menyebar di 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa. Jumlah pemilih yang memanfaatkan hak pilihnya adalah sebanyak 1.139.349, yang setara dengan 58,2% dari total suara, sementara yang tidak memanfaatkan hak pilihnya mencapai 818.978 suara, atau sekitar 41,8% dari total suara. Sektor pertanian mendominasi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Malang, yang mencakup hampir 40% dari populasi, diikuti oleh sektor industri sebesar 18%, sektor jasa sebesar 11%, dan sektor lainnya sebesar 32%. Dominasi mata pencaharian sebagai petani membuat kultur masyarakat pedesaan di Kabupaten Malang masih sangat kental. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang harus merancang strategi pendidikan pemilih yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, guna memastikan terciptanya kerjasama yang optimal antara KPU dan masyarakat.

Lokasi Kantor KPU Kabupaten Malang berada di Jalan Panji No. 119, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Misi peningkatan partisipasi serta kualitas pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Serentak menjadi fokus KPI Kabupaten Malang. Kabupaten Malang mengalami tingkat kerawanan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020, dengan merujuk pada data tahun 2019, yang masih tergolong dalam kategori sedang dengan skor 49,17. Angka tersebut belum mencapai zona merah atau Indeks Kerawanan Pemilihan yang tinggi sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Jember, dan Banyuwangi. KPU Kabupaten Malang menetapkan target pendidikan pemilih di 6 dari total 33 kecamatan yang berada di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya pemilih yang berpartisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kepanjen dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 54,83%, Ampelgading 55,79%, Kalipare 56,45%, Bantur 56,75%, Dau 58,51%, dan Pakis 58,64% (Groot, 2018).

Partisipasi pemilih memegang peranan yang signifikan dalam menentukan kesuksesan suatu proses pemilihan umum. Sehingga upaya pendidikan politik menjadi esensial guna meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga

mereka dapat terlibat secara optimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi politik guna memastikan bahwa masyarakat bersedia dan mampu menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian, peneliti ingin mengeksplorasi strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Malang dalam melakukan pendidikan pemilih dengan kategori tersebut, apakah ada perbedaan model pendidikan yang diterapkan KPU Kabupaten Malang dibandingkan daerah lain dengan persoalan pemilih yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja yang menjadi Pendukung dan Penghambat Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka penelitian bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Setelah Adanya Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan Strategi Pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi program pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perbaikan pelaksanaan kebijakan untuk kedepannya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber acuan dan jendela ilmiah yang memberikan wawasan mendalam, terutama terkait strategi program pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu titik tolak dan sumber literatur yang bernilai untuk kemajuan riset dan bagi peneliti masa depan dalam ranah yang sama.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian esensial dari suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai karakteristik suatu isu yang menjadi fokus penelitian. Bagian ini akan memberikan fokus serta ruang lingkup penelitian. Berikut definisi konseptual dari masing-masing variabel dari judul penelitian.

a. Strategi

Strategi politik menurut (Sukri, 2020), adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan politik tertentu. Contohnya, strategi tersebut dapat mencakup pengenalan kebijakan baru, pelaksanaan program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi. Penerapan strategi politik seringkali menjadi kunci dalam upaya memenangkan atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini erat kaitannya dengan strategi kampanye yang bertujuan untuk meraih sebanyak mungkin dukungan dan pengaruh pada saat pemilihan umum. Ketidaksiapan dalam merencanakan langkah yang matang, baik oleh partai politik maupun pemerintah, seringkali menghasilkan proyek-proyek yang gagal dan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada, bahkan hingga penolakan terhadap legitimasi pemerintah yang dinilai terlalu lemah dalam menegakkan aturan.

Strategi politik relevan bagi pemerintah, partai politik serta

organisasi non-pemerintah yang terlibat aktif dalam politik. Semua pihak tersebut memerlukan strategi yang terarah untuk mencapai formulasi dan tujuan jangka panjang dan memilih tindakan yang sesuai. Tanpa strategi politik yang solid, upaya untuk merumuskan tujuan jangka panjang dan mengambil tindakan konkret akan sulit terwujud. Perencanaan strategis untuk perubahan juga proses politik adalah kajian mendalam terhadap jelasnya visi mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai, dinamika kekuasaan, serta mobilisasi seluruh sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah memiliki tugas pokok yang terdiri dari tiga fungsi utama, yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Ketiga fungsi ini menggambarkan bahwa penyediaan layanan yang efektif akan berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam masyarakat, serta akan mendorong proses pembangunan yang berujung pada kemakmuran sosial. Strategi pemerintah dalam ini mengacu kepada Tindakan yang diambil pemerintah dalam pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.

b. Pendidikan Pemilih

Secara umum, pendidikan pemilih memiliki tujuan utama untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas partisipasi dalam proses pemilihan umum. Lebih lanjut, pendidikan pemilih juga memiliki tujuan guna mendukung peningkatan kemampuan literasi politik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik bagi pemilih. Selain itu, pendidikan pemilih diarahkan untuk memperkuat kerelawanan masyarakat dalam konteks proses demokratisasi. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih, terdapat penekanan pada beberapa tujuan program tersebut. Pertama, melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat, program pendidikan pemilih memiliki tujuan guna menyebarkan informasi terkait program, jadwal, dan tahapan pemilu. Kedua, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat tentang hak juga kewajiban pada konteks pemilu. Ketiga, pendidikan pemilih diharapkan dapat mendorong

peningkatan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum.

c. **Partisipasi**

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan secara aktif perorangan sebagai warga negara pada proses pengaruh terhadap pembuatan serta implementasi kebijakan umum, sekaligus dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Menurut (Subekti, 2014), partisipasi politik dapat diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kapasitas individu dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat bervariasi dalam tingkat frekuensi, karakteristik, dan dampaknya, dapat bersifat spontan, terjadi secara rutin atau tidak teratur, serta dapat manifestasi dalam bentuk kerjasama yang harmonis, kedamaian, atau bahkan tindakan yang bersifat kekerasan. Selain itu, partisipasi politik dapat mengikuti jalur hukum yang sah atau melanggar aturan yang berlaku, serta memiliki efektivitas yang bervariasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya aktif dalam memberikan pengaruh seorang warga negara terhadap kebijakan publik, menentukan para pemimpin politik, dan pendistribusian kekuasaan di dalam masyarakat. Aktivitas seperti memberikan suara (*voting*) dalam pemilu dianggap sebagai salah satu bentuk dasar partisipasi politik aktif. Namun, partisipasi politik tidak terbatas pada tindakan tersebut, dan melibatkan berbagai tingkat intensitas dari partisipasi yang minimal hingga partisipasi yang sangat aktif. Orang-orang yang menunjukkan apatinya terhadap proses politik secara total biasanya disebabkan oleh faktor pribadi (internal) atau faktor luar (eksternal) yang berada di luar kendali individu, sehingga menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan prosedur atau cara yang digunakan untuk mendefinisikan juga mengukur suatu variabel atau konsep dalam hal-hal yang terukur secara empiris. Berdasarkan teori dari William N. Dunn bahwa analisis kebijakan yang terkait dengan hal sebelum dan sesudah implementasi sebuah kebijakan.

1. Strategi pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang
 - a. Perumusan Strategi pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.
 - b. Pemetaan wilayah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.
 - c. Model Strategi pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.
 - d. Partisipasi masyarakat setelah adanya strategi Pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang.
2. Faktor apa saja yang menjadi Pendukung dan Penghambat Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini direkomendasikan sebagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan permasalahan dan hipotesis penelitian. Metode deskriptif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran fenomena melalui pengumpulan data dari subjek yang diamati baik dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Dengan mengadopsi pendekatan ini, peneliti harus mampu mengidentifikasi dengan cermat akar permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang relevan. Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan saat melakukan penelitian terdiri dari dua sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang proses perolehan datanya melalui penelitian secara langsung di lapangan dengan kegiatan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang lengkap dan rinci untuk mengetahui fakta dari fenomena yang di

amati, setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subjek penelitian agar data yang di peroleh objektif, wawancara di lakukan dengan berbagai subjek mencakup beberapa hal seputar Strategi Pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang tahun.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data proses pengumpulannya tidak langsung dan dari berbagai media. Biasanya, data sekunder berbentuk laporan historis atau catatan yang disusun dengan baik dalam berkas, baik yang telah maupun tidak disebar luaskan. Keuntungan dari penggunaan data sekunder yaitu penghematan biaya dan waktu, karena peneliti tidak perlu melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau melakukan wawancara. Data dapat diperoleh melalui segala macam sumber misalnya jurnal, buku, informasi dari media cetak atau online, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh beragam informasi tambahan dan melakukan perbandingan antar data. Sumber data sekunder yang relevan pada penelitian ini mencakup Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, jurnal, laporan kinerja KPU Kabupaten Malang, situs web KPU Kabupaten Malang, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pada penelitian ini.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini memerlukan penerapan teknik sampling. Dalam menentukan subjek penelitian, beberapa kriteria harus dipertimbangkan, antara lain kemampuan subjek untuk memahami dan menguasai materi yang diteliti, keterlibatan subjek dalam fenomena yang diteliti, ketidakberpihakan subjek dalam menyampaikan informasi, dan ketersediaan waktu untuk pengumpulan informasi dan wawancara.

Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, serta Sumber Daya Manusia sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu individu yang bertanggung jawab penuh terhadap Pendidikan Pemilih, sehingga dapat dipastikan bahwa informan tersebut memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap esensial pada proses penelitian, karena esensi penelitian yaitu memperoleh data yang relevan sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Ketidaktahuan peneliti terhadap teknik pengumpulan data dapat menghambat perolehan data yang sesuai kriteria standar yang ada. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sesuai dengan metode (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan melalui *face to face interview* (wawancara tatap muka) secara langsung dengan partisipan. Oleh karena itu, proses wawancara ini membutuhkan penyusunan pertanyaan yang sistematis, baik dalam format terstruktur maupun semi-terstruktur. Teknik tersebut melibatkan interaksi langsung melalui wawancara dengan pegawai atau staff KPU Kabupaten Malang yang paham mengenai program tersebut.

b. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa observasi merupakan fondasi utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Para akademisi hanya dapat mengembangkan penelitian mereka berdasarkan data yang diperoleh melalui proses observasi. Melalui proses observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks situasional yang relevan dengan data yang diperlukan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menggali pemahaman tentang situasi yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak lain, terutama mereka yang berada di dalam ruang lingkup yang sedang diamati.

Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengamatan dengan cara mencari informan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai strategi pendidikan pemilih di daerah dengan potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang. Proses observasi ini bertujuan agar peneliti merasa lebih dekat dengan subjek penelitian, membangun hubungan yang baik sebagai langkah penting dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Upaya membuat subjek penelitian merasa nyaman selama proses penelitian

bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan efektif. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan diskusi dengan subjek penelitian mengenai beberapa aspek, seperti lokasi observasi, pembatasan informasi yang diinginkan, dan penyesuaian jadwal dengan rutinitas subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat terdiri dari berbagai bentuk, termasuk gambar, tulisan, atau karya seni. Keakuratan hasil observasi atau wawancara dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan dari hasil dokumentasi yang dihasilkan selama proses pengumpulan data. Dokumentasi ini dapat berupa video, foto, atau rekaman suara yang diambil selama proses pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Data dokumentasi menjadi penting bagi peneliti sebagai pelengkap data yang diperoleh dari wawancara. Dokumentasi dapat mencakup laporan penelitian, arsip, maupun catatan dokumen resmi yang mendukung jalannya penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dapat berasal dari materi visual seperti gambar, video, dan rekaman suara. Bagian ini dari penelitian akan memanfaatkan foto dan rekaman suara yang diambil selama sesi wawancara dengan subjek penelitian. Sebelum mendokumentasikan, peneliti terlebih dahulu menanyakan izin subjek penelitian. Jika subjek tidak mengizinkan, peneliti akan menghormati keputusan tersebut untuk menjaga privasi subjek penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor KPU Kabupaten Malang Jalan Panji No. 119, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian dan pengkajian akan dilakukan mengenai Strategi Pendidikan Pemilih di Daerah Potensi Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang.

6. Teknik Analisa Data

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Penelitian ini melibatkan observasi serta wawancara dengan subjek terkait guna mengklarifikasi dan memverifikasi

data yang didapat. Penggunaan metode kualitatif deskriptif diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif apabila dianalisis secara tepat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa pendekatan analisis data sebagai berikut..

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa konsep "reduksi data" melibatkan proses seleksi data yang esensial serta penekanan pada transformasi data kasar, pengabstrakan, dan penyederhanaan yang dihasilkan dari pengumpulan data lapangan. Fokus reduksi data pada penelitian ini terkait dengan Strategi Pendidikan Pemilih di daerah dengan potensi tingkat partisipasi yang rendah di Kabupaten Malang. Reduksi data bertujuan untuk menghadirkan spesifikasi gambaran sehingga memudahkan proses *collecting data* berikutnya oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menyusun sekumpulan informasi sehingga memungkinkan proses pengambilan tindakan atau penarikan kesimpulan. Melalui jelasnya penyajian data, orang akan mampu dengan mudah memahaminya, terutama jika didukung oleh penyusunan konsep terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data berdasar pada analisis Strategi Pendidikan Pemilih di daerah dengan potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang. Sehingga, analisis komprehensif harus dilakukan dalam proses penyajian data, sebab hal tersebut memiliki korelasi langsung dengan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didapatkan melalui interaksi antara dua data berbeda sehingga tercipta kesimpulan yang tepat berdasar pada analisis penelitian. Sebelum terdapat bukti konsisten dan valid yang diperoleh melalui data lapangan, maka kesimpulan awal sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu, terdapat urgensi bagi peneliti dalam pengumpulan data yang akurat agar menghasilkan kesimpulan akhir yang kredibel dan berkualitas.

7. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan rentang waktu atau periode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi serta pembuatan laporan dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan alur lini untuk rancangan waktu pada masa pelaksanaan penelitian.

Tabel 1. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

| Kegiatan | Bulan 1 | | | | Bulan 2 | | | | Bulan 3 | | | |
|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Studi literatur dan Data Set | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Penulisan proposal dan presentasi Hasil Proposal | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Pengurusan administrasi dan Perizinan | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Implementasi survie, penelitian dan olah data | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Penulisan laporan dan presentasi hasil | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Penulisan artikel publikasi | | | | | | | | | | | ■ | ■ |